



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, Telepon (021) 7260864, Faksimili (021) 7392786

PENGUMUMAN
Nomor : KP.02.01-Mn/20

TENTANG

**HASIL SELEKSI PASCA MASA SANGGAH
PENGADAAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
UNTUK JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN
TAHUN 2022**

Menyusuli pengumuman nomor : KP.02.01-Mn/2795 tanggal 30 Desember 2022 perihal Hasil Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Untuk Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2022, bersama ini diumumkan hal-hal sebagai berikut :

1. Peserta yang dinyatakan **tidak lulus** Seleksi Pengadaan CPPPK Kementerian PUPR Untuk Jabatan Fungsional Kesehatan tahun 2022 telah diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggahan atas hasil seleksi melalui *website* <https://sscasn.bkn.go.id> mulai tanggal 30 Desember 2022 Pukul 19:57 sampai dengan 05 Januari 2023 Pukul 23:59.
2. Hasil verifikasi terhadap sanggahan peserta yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Kementerian PUPR mulai tanggal 03 Januari 2023 sampai dengan 09 Januari 2023 adalah sebagai berikut :

Nomor Peserta	Nama	Jabatan Yang Dilamar	Status Jawab Sanggah
1271034510910011	Ruth Golda Kristy	Bidan Terampil	Ditolak

dengan keterangan rinci alasan penolakan sanggah dapat dilihat melalui *website* <https://sscasn.bkn.go.id>. dengan menggunakan akun masing-masing peserta pada

3. Berdasarkan penjelasan pada poin 2 di atas, maka penetapan kelulusan Seleksi Pengadaan CPPPK Kementerian PUPR Untuk Jabatan Fungsional Kesehatan tahun 2022 **tetap mengacu** pada lampiran surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor : 43892/RKS.04.03/SD/K/2022 tanggal 29 Desember 2022 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Calon PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun 2022 sebagaimana tercantum pada pengumuman nomor : KP.02.01-Mn/2795 tanggal 30 Desember 2022.
4. Peserta yang dinyatakan **LULUS** Seleksi Pengadaan CPPPK Kementerian PUPR Untuk Jabatan Fungsional Kesehatan tahun 2022 (kode "P/L") diwajibkan menyampaikan kelengkapan dokumen dan pengisian daftar riwayat hidup (DRH) untuk usulan nomor induk PPPK (NI PPPK) melalui *website* <https://sscasn.bkn.go.id> mulai tanggal **12 Januari 2023 sampai dengan 05 Februari 2023** dengan mekanisme sebagaimana tercantum pada lampiran I pengumuman ini.
5. Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian seluruh peserta pengadaan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional tenaga kesehatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2022.

Jakarta, 09 Januari 2023

a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
Sekretaris Jenderal,

Cap.Ttd

Mohammad Zainal Fatah
NIP.196610211996031001

**MEKANISME DAN JADWAL PEMBERKASAN DOKUMEN
PENGANGKATAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
UNTUK JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN
TAHUN 2022**

A. KETENTUAN UMUM

Pelamar yang dinyatakan **LULUS SELEKSI** akan diangkat sebagai calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Kementerian PUPR selanjutnya diusulkan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk memperoleh penetapan nomor induk Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja dan diangkat sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kementerian PUPR.

Sehubungan dengan hal tersebut untuk tertib administrasi kepegawaian dan kelancaran proses penetapan nomor induk PPPK dan penerbitan surat keputusan pengangkatan PPPK, perlu segera dilakukan pemberkasan bagi pelamar yang dinyatakan **LULUS SELEKSI**, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bagi pelamar yang dinyatakan lulus harus menyampaikan kelengkapan dokumen pendukung untuk diusulkan penetapan nomor induk PPPK dan diangkat sebagai PPPK Kementerian PUPR **secara daring (*online*) dengan mengunggah dokumen melalui website <https://sscasn.bkn.go.id> dan mengirimkan dokumen fisik kepada Panitia Seleksi Pengadaan Calon PPPK Kementerian PUPR.**
2. Dalam hal peserta seleksi yang sudah dinyatakan lulus , tetapi pada saat pemberkasan atau di kemudian hari terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan dan/atau tidak memenuhi persyaratan lainnya yang telah ditetapkan, maka kelulusannya akan dibatalkan.
3. Apabila terdapat pelamar yang dinyatakan lulus kemudian :
 - a. Mengundurkan diri, dapat memilih opsi pengunduran diri di *website* <https://sscasn.bkn.go.id>, mengisi surat pengunduran diri sesuai format yang sudah disediakan serta mengunggah surat pengunduran diri yang sudah dibuat dan ditandatangani melalui *website* <https://sscasn.bkn.go.id>.
 - b. Meninggal dunia, Orang Tua/Ahli Waris yang bersangkutan harus segera menyampaikan surat keterangan kematian dari Pejabat yang berwenang (Kepala Desa atau Lurah setempat) kepada Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana, Sekretariat Jenderal, Kementerian PUPR.
4. Apabila pelamar yang dinyatakan lulus sampai dengan **batas waktu pelaksanaan pemberkasan secara daring (*online*) tidak mengunggah dokumen dan/atau mengisi DRH melalui website <https://sscasn.bkn.go.id>, maka dianggap gugur/mengundurkan diri.**
5. Jika pelamar yang dinyatakan lulus ternyata **tidak dapat menunjukkan Ijazah dan Transkrip asli**, maka yang bersangkutan dinyatakan gugur/tidak lulus.
6. Peserta seleksi yang sudah dinyatakan lulus wajib membuat surat pernyataan yang menyatakan :
 - a. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - b. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai calon PNS atau PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- d. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis; dan
 - e. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.
7. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan Nomor Induk PPPK kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

B. KELENGKAPAN DOKUMEN PENETAPAN NOMOR INDUK PPPK

Adapun kelengkapan dokumen usul penetapan Nomor Induk PPPK yang harus disampaikan oleh peserta yaitu :

No	Jenis dan Cara Penyampaian Dokumen		Keterangan
	Penyampaian dokumen secara fisik	Secara daring (<i>online</i>) melalui https://sscasn.bkn.go.id	
A	B	C	D
1	Asli surat lamaran yang telah dibubuhi materai tempel/e-materai Rp 10.000,- dan ditandatangani oleh pelamar sesuai format Lampiran II.A	Hasil surat lamaran yang telah dibubuhi materai tempel/e-materai Rp 10.000,- dan ditandatangani oleh pelamar sesuai format Lampiran II.A	Hasil scan file format *.pdf multiple page. ukuran maksimal 1000Kb.
2	Salinan ijazah yang telah dilegalisir dengan tanda tangan asli/basah (bukan stempel tanda tangan) oleh Pejabat yang berwenang (sesuai dengan lampiran II) beserta Salinan SK Penyetaraan ijazah luar negeri dari Kemendikbud untuk Ijazah Luar Negeri yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.	Hasil scan ijazah asli sesuai dengan jenjang dan kualifikasi pendidikan yang dilamar beserta hasil scan SK Penyetaraan ijazah luar negeri dari Kemendikbud untuk Ijazah Luar Negeri	Hasil scan ijazah dan SK Penyetaraan Dikti (bagi ijazah luar negeri) digabung dalam 1 (satu) file format *.pdf multiple page ukuran maksimal 1000Kb.
3	Salinan transkrip nilai yang telah dilegalisir dengan tanda tangan asli/basah (bukan stempel tanda tangan) oleh Pejabat yang berwenang (sesuai dengan lampiran II) beserta Salinan SK Penyetaraan/Konversi IPK dari Kemendikbud untuk lulusan PT Luar Negeri yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.	Hasil scan transkrip nilai asli sesuai dengan jenjang dan kualifikasi pendidikan yang dilamar beserta hasil scan SK Penyetaraan/Konversi IPK dari Kemendikbud untuk lulusan PT Luar Negeri	Hasil scan file format *.pdf multiple page ukuran maksimal 1000Kb. (bagi lulusan PT luar negeri) digabung dalam 1 (satu) file format *.pdf multiple page ukuran maksimal 1000Kb.
4	Pasfoto berwarna terbaru dengan menggunakan pakaian formal dengan latar belakang warna MERAH dengan Ukuran 4x6 cm sebanyak 4 (empat) lembar dan dituliskan nama dibelakang pas foto	Pasfoto berwarna terbaru dengan menggunakan pakaian formal dengan latar belakang warna MERAH	File format *.jpeg/*.jpg ukuran minimal 100Kb dan maksimal 300KB (wajib sesuai ketentuan)

No	Jenis dan Cara Penyampaian Dokumen		Keterangan
	Penyampaian dokumen secara fisik	Secara daring (online) melalui https://sscn.bkn.go.id	
A	B	C	D
5	Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia serendah-rendahnya setingkat Kepolisian Resor (Kabupaten/Kota) yang masih berlaku (dikeluarkan tanggal 01 Agustus 2022 atau setelahnya)	Hasil scan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia serendah-rendahnya setingkat Kepolisian Resor (Kabupaten/Kota) yang masih berlaku (dikeluarkan paling lama 6 (enam) bulan sebelum tanggal pemberkasan secara daring (dikeluarkan tanggal 01 Agustus 2022 atau setelahnya).	Hasil scan file format *.pdf multiple page ukuran maksimal 1000Kb.
6	Asli Surat keterangan sehat Jasmani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah (Rumah Sakit Umum Pusat/Daerah) yang dikeluarkan tanggal 10 Januari 2023 atau setelahnya.	Hasil scan Surat keterangan sehat Jasmani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah (Rumah Sakit Umum Pusat/Daerah) yang dikeluarkan tanggal 10 Januari 2023 atau setelahnya.	Hasil scan surat keterangan sehat jasmani, surat keterangan sehat rohani dan surat keterangan jenis/tingkat
7	Asli Surat keterangan sehat Rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah (Rumah Sakit Umum Pusat/Daerah) yang dikeluarkan tanggal 10 Januari 2023 atau setelahnya.	Hasil scan Surat keterangan sehat Rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah (Rumah Sakit Umum Pusat/Daerah) yang dikeluarkan tanggal 10 Januari 2023 atau setelahnya.	disabilitas bagi pelamar formasi penyandang disabilitas digabung dalam 1 (satu) file format *.pdf multiple page. ukuran maksimal
8	<i>Khusus Pelamar formasi penyandang disabilitas yang dinyatakan lulus seleksi, diwajibkan turut melampirkan Asli Surat Keterangan Dokter yang menerangkan jenis/tingkat disabilitas yang diunggah pada saat melakukan pendaftaran.</i>	<i>Khusus Pelamar formasi penyandang disabilitas yang dinyatakan lulus seleksi, diwajibkan turut melampirkan hasil scan Surat Keterangan Dokter yang menerangkan jenis/tingkat disabilitas yang diunggah pada saat melakukan pendaftaran.</i>	1000Kb.
9	Asli surat keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif (NAPZA) lainnya disertai hasil uji laboratorium yang ditandatangani oleh dokter dari Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengujian zat narkoba (Rumah Sakit Umum Pusat/Daerah atau Badan Narkotika Nasional) dan yang dikeluarkan tanggal 10 Januari 2023 atau setelahnya.	Hasil scan surat keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif (NAPZA) lainnya disertai hasil uji laboratorium yang ditandatangani oleh dokter dari Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengujian zat narkoba (Rumah Sakit Umum Pusat/Daerah atau Badan Narkotika Nasional) dan yang dikeluarkan tanggal 10 Januari 2023 atau setelahnya.	Hasil scan file format *.pdf multiple page. ukuran maksimal 1000Kb.

No	Jenis dan Cara Penyampaian Dokumen		Keterangan
	Penyampaian dokumen secara fisik	Secara daring (online) melalui https://sscn.bkn.go.id	
A	B	C	D
10	Asli surat pernyataan 5 (lima) poin yang telah ditandatangani di atas materai/e-materai Rp.10.000,- oleh peserta. sesuai format Lampiran II.B	Hasil scan surat pernyataan 5 (lima) poin yang telah ditandatangani di atas materai/e-materai Rp.10.000,- oleh peserta sesuai format Lampiran II.B	Hasil scan file format *.pdf multiple page. ukuran maksimal 1000Kb.
11	Hasil cetakan asli seluruh halaman Daftar Riwayat Hidup (DRH) dari SSCASN yang telah yang telah dibubuhi materai tempel/e-materai Rp 10.000,- dan ditandatangani oleh peserta.	Hasil scan cetakan seluruh halaman Daftar Riwayat Hidup (DRH) dari SSCASN yang telah yang telah dibubuhi materai tempel/e-materai Rp 10.000,- dan ditandatangani oleh peserta.	Hasil scan file format *.pdf multiple page ukuran maksimal 1000Kb.
12	Salinan Surat Keterangan Pengalaman Kerja pada Instansi Pemerintah/Swasta	-	Tidak diunggah (<i>upload</i>)
13	Surat Rekomendasi/Surat Keterangan telah bekerja paling sedikit 3 (tiga) tahun secara terus-menerus Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (khusus Non ASN Tenaga Kesehatan Biro Umum, Setjen, Kem. PUPR yang berusia di atas 35 tahun dan telah bekerja secara terus menerus paling sedikit 3 tahun sampai saat ini *)	-	Tidak diunggah (<i>upload</i>)
14	Surat Rekomendasi/ Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (khusus Non ASN Tenaga Kesehatan Biro Umum, Setjen, Kem. PUPR*).	-	Tidak diunggah (<i>upload</i>)
15	SK Pengangkatan Non ASN Tenaga Kesehatan/ Surat Keputusan Penugasan/Surat Selesai Pengabdian dari Kemenkes atau Surat Selesai Masa Bakti/Selesai Masa Tugas dari Pemerintah Daerah (khusus pelamar Non ASN Tenaga Kesehatan Biro Umum, Setjen, Kem. PUPR yang berusia di atas 35 tahun dan telah bekerja secara terus menerus paling sedikit 3 tahun sampai saat ini /Pelamar yang sedang dan/atau telah melaksanakan pengabdian pelayanan Kesehatan*)	-	Tidak diunggah (<i>upload</i>)

No	Jenis dan Cara Penyampaian Dokumen		Keterangan
	Penyampaian dokumen secara fisik	Secara daring (online) melalui https://sscn.bkn.go.id	
A	B	C	D
16	Salinan Sertifikat Keahlian/Kompetensi/Surat Tanda Registrasi Tenaga Kesehatan	-	Tidak diunggah (<i>upload</i>)
17	Sertifikat tes kemampuan Bahasa Inggris asli yang diunggah pada saat melakukan pendaftaran seleksi di website https://sscasn.bkn.go.id	-	Tidak diunggah (<i>upload</i>)

C. JADWAL PEMBERKASAN DOKUMEN

1. Peserta yang dinyatakan LULUS diwajibkan untuk menyampaikan dokumen dengan jadwal sebagai berikut :

No	Uraian	Jadwal	Keterangan
1	Penyampaian dokumen secara daring (online) melalui https://sscasn.bkn.go.id	12 Januari 2023 s.d 05 Februari 2023	Peserta diharuskan memperhatikan batas waktu penyampaian dokumen secara daring (online). Apabila pelamar yang dinyatakan lulus sampai dengan batas waktu pelaksanaan pemberkasan secara daring (online) tidak mengunggah dokumen dan/atau mengisi DRH melalui website https://sscasn.bkn.go.id , maka dianggap gugur/mengundurkan diri.
2	Penyampaian dokumen secara fisik	12 Januari 2023 s.d 31 Januari 2023	Peserta diminta untuk memperhatikan batas waktu penyampaian dokumen secara fisik.

2. Peserta menyampaikan kelengkapan dokumen secara fisik sebanyak 1 (satu) rangkap, disusun sesuai urutan dokumen pada tabel di poin B di atas dan dimasukkan ke dalam Stop Map Warna **MERAH**
Pada pojok kiri atas stop map dituliskan keterangan :

Nama	:
Jabatan	:
Pendidikan	:

Selanjutnya stop map dimasukkan ke dalam amplop tertutup yang pada pojok kiri atas amplop dituliskan keterangan (Dokumen Seleksi CPPPK PUPR Tahun 2022 / Jabatan/Pendidikan) dan dikirimkan melalui pos yang ditujukan kepada:

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
c.q. Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
Gedung Utama Lantai 8, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,
Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kode Pos 12110

Contoh :

<p>DOKUMEN SELEKSI CPPPK PUPR TAHUN 2022 / BIDAN / DIII KEBIDANAN</p>
<p>Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat c.q.Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Gedung Utama Lantai 8, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kode Pos 12110</p>

D. LAIN-LAIN

1. Seluruh proses seleksi Pengadaan CPPPK, penetapan Nomor Induk PPPK serta penetapan Surat Keputusan Pengangkatan PPPK Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat **TIDAK DIPUNGUT BIAYA.**
2. Segala biaya/akomodasi selama mengikuti proses seleksi dan pemberkasan dokumen ditanggung oleh peserta.
3. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum-oknum yang mengatas-namakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Panitia Seleksi sehingga **peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran yang menjanjikan kemudahan pengangkatan sebagai Calon PPPK.**
4. Untuk bantuan teknis dan informasi terkait pemberkasan dokumen penetapan Nomor Induk PPPK, peserta dapat menghubungi layanan bantuan dan mengakses informasi melalui jalur sebagai berikut :
 - a. Panitia membuka jalur layanan bantuan melalui Telepone (*hotline*) bagi para pelamar pada hari dan jam kerja, Senin–Jumat, pukul 09:00–16:30 WIB selama periode pemberkasan (Panitia tidak melayani SMS) dengan nomor **0818-0312-1945 dan 0819-0312-1945**
 - b. Informasi terkini terkait akan disampaikan melalui *website* Sistem Seleksi ASN Nasional (<https://sscasn.bkn.go.id>) dan *website* Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (<https://setjen.pu.go.id/bko>)

LAMPIRAN II PENGUMUMAN
NOMOR : KP.02.01-Mn/20

A. FORMAT SURAT LAMARAN

....., 11 Januari 2023

Kepada Yth.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Republik Indonesia
di –

Jakarta

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis Kelamin : (Laki-laki / Perempuan)
NIK :
Pendidikan :
Jabatan yang dilamar :
Alamat Domisili Saat Ini :

Dengan ini menyampaikan permohonan agar dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2022. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan berkas permohonan dimaksud, sebagai berikut:

1. Pasfoto terbaru dengan menggunakan pakaian formal dan latar belakang warna MERAH Ukuran 4x6 cm sebanyak 4 (empat) lembar.
2. Salinan Ijazah dan Transkrip nilai yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang beserta SK Penyetaraan Ijazah asli dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi **(khusus bagi ijazah yang diterbitkan di luar negeri)**.
3. Daftar riwayat hidup yang ditandatangani diatas materai/e-materai RP. 10.000,-.
4. Surat keterangan catatan kepolisian (SKCK).
5. Surat keterangan sehat jasmani dan Surat keterangan sehat rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah.
6. Surat keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif (NAPZA) lainnya yang disertai hasil uji laboratorium.
7. Surat pernyataan 5 (lima) Poin yang ditandatangani di atas materai/e-materai RP. 10.000,-.
8. Surat Pengalaman Kerja pada Instansi Pemerintah/Swasta.
9. Surat Rekomendasi/Surat Keterangan telah bekerja paling sedikit 3 (tiga) tahun secara terus- menerus Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat **(khusus Non ASN Tenaga Kesehatan Biro Umum, Setjen, Kem. PUPR yang berusia di atas 35 tahun dan telah bekerja secara terus menerus paling sedikit 3 tahun sampai saat ini *)**.
10. Surat Rekomendasi/ Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat **(khusus Non ASN Tenaga Kesehatan Biro Umum, Setjen, Kem. PUPR*)**.
11. SK Pengangkatan Non ASN Tenaga Kesehatan/ Surat Keputusan Penugasan/Surat Selesai Pengabdian dari Kemenkes atau Surat Selesai Masa Bakti/Selesai Masa Tugas dari Pemerintah Daerah **(khusus pelamar Non ASN Tenaga Kesehatan Biro Umum, Setjen, Kem. PUPR yang berusia di atas 35 tahun dan telah bekerja secara terus menerus paling sedikit 3 tahun sampai saat ini /Pelamar yang sedang dan/atau telah melaksanakan pengabdian pelayanan Kesehatan*)**.
12. Sertifikat Keahlian/Kompetensi/Surat Tanda Registrasi Tenaga Kesehatan
13. Sertifikat tes kemampuan Bahasa Inggris.
14. Hasil scan Surat Keterangan Dokter yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitas **(khusus bagi pelamar penyandang disabilitas*)**.

Demikian surat lamaran ini dibuat. Adapun seluruh data dan dokumen yang saya berikan adalah benar. Apabila dikemudian hari ditemukan data yang tidak benar, maka saya menerima keputusan panitia untuk membatalkan keikutsertaan/kelulusan saya pada seleksi dan bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun.

Materai/
e-materai
Rp 10.000

Hormat Saya,

Ttd.

(Nama Lengkap)

*) Diisi dan dicetak
**) Hapus/hilangkan yang tidak perlu

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN 5 (LIMA) POIN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis Kelamin : *(Laki-laki / Perempuan)*
NIK :
Pendidikan :
Jabatan yang dilamar :
Alamat Domisili Saat Ini :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai calon PNS atau PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis; dan
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

....., 11 Januari 2023

Materai/ e-materai Rp 10.000

Ttd
(Nama Lengkap)

C. DAFTAR PEJABAT YANG BERWENANG MENGESAHKAN FOTO COPY IJAZAH/STTB

NO	JENJANG PENDIDIKAN	PEJABAT YANG MENGELUARKAN DAN MENANDATANGANI IJAZAH ASLI	PEJABAT YANG MENGESAHKAN / MELEGALISIR FOTO COPY
A	B	C	D
1	Universitas / Institut	Rektor dan Dekan	Rektor / Dekan / Pembantu Dekan Bidang Akademik
2	Sekolah Tinggi	Ketua dan Pembantu Ketua Bidang Akademik	Ketua/Pembantu Ketua Bidang Akademik
3	Akademi dan Politeknik	Direktur dan Pembantu Direktur Bidang Akademik	Direktur/Pembantu Direktur Bidang Akademik
4	PTS Agama Islam	Pimpinan Kopertis	Pejabat yang berwenang dan berkompeten pada Kopertis
5	PTS Agama Hindu / Budha / Kristen / Katholik	Ketua/Direktur Urusan dan Direktur Bimas Urusan Agama yang bersangkutan	Kabid Bimas Agama yang bersangkutan pada Kanwil Agama/Kakandep Agama Kabupaten/Kota dan Direktur / Sekretaris Ditjen Bimas yang bersangkutan
6	Sekolah/Akademi /PT. Kedinasan	Pimpinan Sekolah/ Akademi / PT. Kedinasan yang bersangkutan	Kepala Sekolah / Ketua / Direktur Akademi atau PT yang bersangkutan, Kepala Pusdiklat/Kabid yang berkompeten.